



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 474 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2025-2027

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa stabilitas laju inflasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, diperlukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Kabupaten Ngawi dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Ngawi dalam Keputusan Bupati Ngawi. Serta dalam rangka perbaikan kinerja dan percepatan pelaksanaan implementasi pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Ngawi, perlu diperkuat dengan dasar pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Ngawi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 – 2027.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027;
9. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
10. Keputusan Bupati Ngawi
Nomor 100.3.3.2/15/404.101.2/B/2025 tentang Tim
Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 – 2027, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mengatur :
- a. Program strategis, program kerja, program teknis dan timeline target selama tahun 2025 – 2027;
 - b. Pelaksanaan inventarisasi data terhadap program kerja untuk dilakukan melalui program teknis pada masing-masing dinas;
 - c. Pelaksanaan program teknis sesuai dengan timeline target yang telah ditentukan;
 - d. Kegiatan pemantauan dan evaluasi program kerja yang berkaitan dengan pengendalian inflasi untuk dilaporkan kepada sekretariat TPID Kabupaten Ngawi sebagai bahan evaluasi rutin;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta memberikan arahan kebijakan pengendalian inflasi daerah kepada TPID Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 25 November 2025
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Sdr. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 474 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 25 November 2025

TABEL ROADMAP PENGEENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2027

4K	Program strategis	Program kerja	Program teknis	Timeline Target			Instansi Pengampu
				2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
Keterjangkauan Harga	Penguatan Pelaksanaan Operasi Pasar	Penguatan pelaksanaan Operasi Pasar dalam rangka penyediaan komoditas dengan harga terjangkau melalui koordinasi lintas instansi untuk stabilisasi harga bahan pokok	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pilot operasi pasar berbasis data harga dan stok			Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Intensifikasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok	Uji coba EPIK di pasar	Implementasi penuh di pasar besar		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Optimalisasi pelaksanaan sidak pasar sebagai upaya pemantauan dan pengawasan kesesuaian harga serta ketersediaan stok bahan pokok di tingkat pasar	Optimalisasi pemanfaatan EPIK (instore atau mobile) untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga stabil	Uji coba EPIK	Implementasi penuh di pasar besar		Dinas ketahanan pangan dan pertanian , Perum Bulog ,Kancab Maadin

1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Penguatan peran Koperasi Merah Putih/BUMD/BUMDes sebagai supplier pasokan EPiK		Identifikasi & penetapan pemasok utama	Berperan sebagai offtaker utama stabilisasi	Bagian Perekonomian
KETERSEDIAAN PASOKAN	Peningkatan Produktivitas	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Peningkatan produksi komoditas Daging, Telur, Susu (year-on-year)	Pelatihan pakan alternatif	Penguatan Kemitraan		Dinas Perikanan dan Peternakan
		Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Facilitasi Sarana Produksi Tanaman Pangan	Pendataan kebutuhan dan penyaluran sarana	Pendataan kebutuhan dan penyaluran sarana		Dinas ketahanan pangan dan pertanian
			Facilitasi Sarana Produksi Tanaman Hortikultura	Bantuan benih hortikultura unggul dan Pelatihan teknik budidaya hortikultura	Bantuan benih hortikultura unggul dan Pelatihan teknik budidaya hortikultura		Dinas ketahanan pangan dan pertanian
		Peningkatan pemanfaatan sarana produksi pertanian (saprodi) yang berkualitas (termasuk organik)	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Pemetaan wilayah rawan OPT dan Implementasi pengendalian OPT terpadu	Pemetaan wilayah rawan OPT dan Implementasi pengendalian OPT terpadu		Dinas ketahanan pangan dan pertanian
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Pelatihan adaptasi iklim	Mitigasi risiko gagal panen		Dinas ketahanan pangan dan pertanian

1	2	3	4	5	6	7	8
		Modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan) melalui program bantuan dan pelatihan teknis kepada petani	Facilitasi Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pra Panen	Pengadaan alsintan pra panen dan pelatihan	Pengadaan alsintan pra panen dan pelatihan	Pendampingan kelompok tani	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
		Penguatan bimbingan teknis berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas hasil produksi	Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) Tanaman Hortikultura	Pelatihan GAP hortikultura dan Pendampingan penerapan GAP	Pelatihan GAP hortikultura dan Pendampingan penerapan GAP		Dinas ketahanan pangan dan pertanian
			Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) Tanaman Pangan	Pelatihan GAP agricultural dan Pendampingan penerapan GAP	Pelatihan GAP agricultural dan Pendampingan penerapan GAP		Dinas ketahanan pangan dan pertanian
			Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) Tanaman Hortikultura	Pelatihan GHP hortikultura dan Pendampingan penerapan GH	Pelatihan GHP hortikultura dan Pendampingan penerapan GH		Dinas ketahanan pangan dan pertanian
			Penerapan Good Handling Practices (GHP) Tanaman Pangan	Pelatihan GHP pangan dan Pendampingan penerapan GHP	Pelatihan GHP pangan dan Pendampingan penerapan GHP		Dinas ketahanan pangan dan pertanian

1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengendalian hama dan penyakit serta mitigasi dampak perubahan iklim	Manajemen Tanaman Sehat	Soisalisasi dan pendampingan MTS	Soisalisasi dan pendampingan MTS		Dinas ketahanan pangan dan pertanian
			Pemantauan luas serangan OPT/DPI	Pemetaan lokasi	Pelaporan bulanan untuk dasar intervensi		Dinas ketahanan pangan dan pertanian
KELANCARAN DISTRIBUSI	Pengembangan Kawasan Produksi	Optimalisasi pemanfaatan lahan dan pekarangan melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi	Teras Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Sosialisasi B2SA kepada rumah tangga, PKK, dan sekolah			Dinas ketahanan pangan dan pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan, DP3AKB
	Peningkatan Infrastruktur Irigasi	Revitalisasi saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier untuk memastikan ketersediaan air yang optimal bagi lahan pertanian	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RIIT)	Identifikasi jaringan irigasi	Identifikasi jaringan irigasi	Rehabilitasi saluran irigas	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Identifikasi jaringan irigasi	Identifikasi jaringan irigasi	Rehabilitasi saluran irigas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Identifikasi jaringan irigasi	Identifikasi jaringan irigasi	Rehabilitasi saluran irigas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan area persawahan untuk mendukung mekanisasi pertanian dan meningkatkan efisiensi produksi	Infrastruktur Jaringan Listrik pendukung irigasi pompanisasi	Pemasangan jaringan listrik untuk mendukung pompanisasi sawah tadah hujan	Pemasangan jaringan listrik untuk mendukung pompanisasi sawah tadah hujan		Dinas ketahanan pangan dan pertanian, PLN UP3 Madiun

1	2	3	4	5	6	7	8
	Penguatan Kelembagaan Petani	Pengembangan program korporasi petani untuk meningkatkan skala ekonomi dan daya saing melalui pembentukan badan usaha kelompok tani	Fasilitasi Pengembangan Korporasi Petani Kabupaten Ngawi	Pemetaan kelompok tani	Pengembangan jaringan pemasaran dan kerja sama dengan offtaker	Pengembangan jaringan pemasaran dan kerja sama dengan offtaker	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
		Penguatan kapasitas lumbung pangan sebagai buffer stock untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi	Konsolidasi mekanisme koordinasi & integrasi data stok lumbung pangan dengan sistem informasi provinsi untuk monitoring real-time	Konsolidasi mekanisme koordinasi & integrasi data stok lumbung pangan dengan sistem informasi provinsi untuk monitoring real-time	Konsolidasi mekanisme koordinasi & integrasi data stok lumbung pangan dengan sistem informasi provinsi untuk monitoring real-time	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
			Mendukung penguatan mekanisme peningkatan CBP Nasional melalui optimalisasi penyerapan gabah beras di seluruh wilayah Jawa Timur	Koordinasi awal dengan stakeholder terkait	Integrasi data stok lumbung pangan dengan sistem informasi TPID untuk respon cepat gejala harga	Integrasi data stok lumbung pangan dengan sistem informasi TPID untuk respon cepat gejala harga	Dinas ketahanan pangan dan pertanian

1	2	3	4	5	6	7	8
	Penguatan Dukungannya Pembiayaan Petani	Penguatan akses pembiayaan petani melalui fasilitasi kerjasama dengan lembaga keuangan formal	Bersinergi dengan koperasi merah putih dan perbankan dalam pendanaan serta kerja sama dengan BUMD dan BUMDes sekitar	Pilot project akses pembiayaan pada komoditas prioritas & Pendampingan teknis dan administrasi	Penguatan koordinasi, kolaborasi dan sinergi	Penguatan koordinasi, kolaborasi dan sinergi	Dinas Koperasi dan UKM , Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Perbank an, Bagian Perekonomian
			Memfasilitasi diskusi potensi akses pembiayaan antara korporasi petani/peternak/nelayan dengan lembaga keuangan formal	Memetakan kebutuhan pembiayaan korporasi petani/peternak/nelayan (skala usaha, gap modal, kelayakan finansial) & Menghubungkan lembaga keuangan dengan OPD terkait untuk sinkronisasi program (asuransi usaha tani, kartu tani, atau subsidi bunga bila tersedia)	Memetakan kebutuhan pembiayaan korporasi petani/peternak/nelayan (skala usaha, gap modal, kelayakan finansial) & Menghubungkan lembaga keuangan dengan OPD terkait untuk sinkronisasi program (asuransi usaha tani, kartu tani, atau subsidi bunga bila tersedia)	Memetakan kebutuhan pembiayaan korporasi petani/peternak/nelayan (skala usaha, gap modal, kelayakan finansial) & Menghubungkan lembaga keuangan dengan OPD terkait untuk sinkronisasi program (asuransi usaha tani, kartu tani, atau subsidi bunga bila tersedia)	
			Pendampingan penyusunan laporan keuangan untuk penguatan akses pembiayaan masyarakat di sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan	Pelatihan dasar pencatatan keuangan sederhana & Penyelarasan standar pencatatan keuangan	Monitoring keberhasilan akses pembiayaan & Pembentukan jejaring kemitraan jangka panjang antara kelompok tani/nelayan dengan lembaga keuangan formal	Monitoring keberhasilan akses pembiayaan & Pembentukan jejaring kemitraan jangka panjang antara kelompok tani/nelayan dengan lembaga keuangan formal	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan

1	2	3	4	5	6	7	8
	Penguatan Kerjasama Antar Daerah, pada level Pemerintah atau Bisnis	Penguatan peran Koperasi/BUMD/Des sebagai off taker strategis untuk menjamin penyerapan hasil produksi petani dengan harga yang layak	Program Penguatan peranKoperasi/BUMD/Des sebagai off taker komoditas strategis	Identifikasi dan penetapan skema Kerjasama	Implementasi awal/ pilot project	Perluasan peran dan integrasi dengan retribusi daerah	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, SETDA
	Peningkatan Kualitas Infra Produksi & Konektivitas	Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi distribusi barang serta mobilitas masyarakat	Program Pengusahaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pemetaan potensi Kerjasama antar daerah	Penandatanganan kesepakatan KAD dan pelaksanaan penuh program pemasaran produk dalam negeri.	Penandatanganan kesepakatan KAD dan pelaksanaan penuh program pemasaran produk dalam negeri.	Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan dan Pertanian, SETDA
			Pemeliharaan Rutin Jalan	berjalan setiap tahun sebagai program wajib	berjalan setiap tahun sebagai program wajib	berjalan setiap tahun sebagai program wajib	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1	2	3	4	5	6	7	8
KOMUNIKASI EFEKTIF	Penguatan Koordinasi Pusat - Daerah	Penyelenggaraan High Level Meeting untuk memastikan sinkronisasi kebijakan Provinsi dan Kab/Kota, serta langkah strategis dalam pengendalian inflasi	High Level Meeting (HLM) TPID Kota/Kab yang dipimpin oleh Bupati/Walikota /Sekretaris Daerah	Konsolidasi awal antar-OPD untuk pemetaan hambatan pengendalian inflasi dan penyusunan solusi lintas sektor	Konsolidasi awal antar-OPD untuk pemetaan hambatan pengendalian inflasi dan penyusunan solusi lintas sektor	Melaksanakan HLM secara reguler (minimal triwulan) dengan fokus pada monitoring capaian 4K (Ketersediaan, Keterjangkauan, Kelancaran Distribusi, Komunikasi)	Bagian Perekonomian
		Penguatan koordinasi antar Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah Tim Pengendalian Inflasi (TPID) melalui forum rapat koordinasi	Rakor rutin TPIP dengan TPID Kabupaten Ngawi dengan standar pelaporan lintas OPD.	berjalan setiap tahun sebagai program wajib	berjalan setiap tahun sebagai program wajib	berjalan setiap tahun sebagai program wajib	Bagian Perekonomian
		Penyelenggaraan rapat koordinasi wilayah untuk membahas isu isu regional dan solusi bersama	Rapat Teknis Tematik Pengendalian Inflasi	berjalan setiap tahun sebagai program wajib	berjalan setiap tahun sebagai program wajib	berjalan setiap tahun sebagai program wajib	Bagian Perekonomian
		Penyusunan produk kebijakan pengendalian inflasi yg kredibel sebagai tindak lanjut komunikasi dan koordinasi antar stakeholder untuk menjaga pola ekspektasi dan psikologis konsumen	Kebijakan mengenai Program Literasi Inflasi untuk OPD dan Pelaku Pasar serta arahan untuk pelaksanaan Pelatihan pemahaman inflasi dan stabilisasi harga bagi perangkat daerah dan pedagang	Pemetaan kebutuhan literasi inflasi bagi OPD, pelaku pasar, dan perangkat daerah & Penyusunan pedoman dasar literasi inflasi daerah (materi, modul, SOP komunikasi)	Pemetaan kebutuhan literasi inflasi bagi OPD, pelaku pasar, dan perangkat daerah & Penyusunan pedoman dasar literasi inflasi daerah (materi, modul, SOP komunikasi)	Penyusunan kebijakan daerah yang terstandar disasi tentang literasi inflasi dan komunikasi publik	Bagian Perekonomian

1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan Kualitas Data	Optimalisasi pemanfaatan portal Satu Data Jawa Timur melalui Penguatan Kualitas dan Keterisian Data Statistik Sektor	Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Statistik Sektor yang memenuhi Proses Bisnis Statistik	Pemetaan Kebutuhan Data Statistik Sektor untuk Pengendalian Inflasi	Penguatan kualitas data, integrasi lintas sektor, serta peningkatan pemanfaatan portal Satu Data untuk pengambilan keputusan TPID.	Penguatan kualitas data, integrasi lintas sektor, serta peningkatan pemanfaatan portal Satu Data untuk pengambilan keputusan TPID.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Penyusunan neraca pangan daerah untuk mendukung perencanaan ketahanan pangan dan stabilisasi harga	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan	Inventarisasi data kebutuhan dan ketersediaan pangan	Penyusunan rekomendasi kebijakan tahunan berdasarkan proyeksi neraca & Integrasi sistem data pangan dengan sistem informasi daerah dan nasional	Penyusunan rekomendasi kebijakan tahunan berdasarkan proyeksi neraca & Integrasi sistem data pangan dengan sistem informasi daerah dan nasional	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan
	Pengendalian Ekspektasi Inflasi	Diseminasi kebijakan teknis dan kampanye program untuk mengendalikan ekspektasi inflasi masyarakat	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Penyusunan pedoman komunikasi publik pengendalian inflasi	Pelaksanaan kampanye melalui penayangan konten edukasi melalui berbagai media & Peluncuran dashboard publik informasi harga pangan berbasis digital sebagai bentuk edukasi jangka panjang	Pelaksanaan kampanye melalui penayangan konten edukasi melalui berbagai media & Peluncuran dashboard publik informasi harga pangan berbasis digital sebagai bentuk edukasi jangka panjang	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan transparansi informasi harga melalui platform yang mudah diakses oleh masyarakat umum	Publikasi Buletin Harga Pangan Melalui Videotron	Penayangan awal informasi harga di videotron dan kanal media sosial	Kolaborasi dengan pedagang, distributor, dan agen untuk memperbarui data harga secara cepat & Digitalisasi penuh sistem informasi harga (dashboard interaktif)	Kolaborasi dengan pedagang, distributor, dan agen untuk memperbarui data harga secara cepat & Digitalisasi penuh sistem informasi harga (dashboard interaktif)	Dinas Komunikasi, Statistika dan Persandian
		Peningkatan Kapasitas Pejuang Inflasi	Pemenuhan Data untuk TPID Awards	TPID Awards TingkatKab/Kota	TPID Award dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk apresiasi dan pemacu kinerja OPD dalam Pengendalian Inflasi	TPID Award dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk apresiasi dan pemacu kinerja OPD dalam Pengendalian Inflasi	Bagian Perekonomian
			Peningkatan kapasitas anggota TPID melalui pelatihan/ workshop, dan studi banding	Capacity Building TPID Kab/Kota	Capacity Building TPID dilakukan tiap tahun untuk memperkuat kapasitas analisis, respon cepat, dan koordinasi teknis	Capacity Building TPID dilakukan tiap tahun untuk memperkuat kapasitas analisis, respon cepat, dan koordinasi teknis	Bagian Perekonomian

BUPATI NGAWI,

td.

ONY ANWAR HARSONO